



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRI PAULINA ANDRIANI
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 141424

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.215.280.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/350 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 797.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m²/375 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 382.485.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/200 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 338.870.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m²/600 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.696.425.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 155.500.000**

1. MOBIL, PEUGEOT SEDAN Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
5. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
6. MOBIL, VW TIGUAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 39.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	147.343.495
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.557.123.495
III. HUTANG	Rp.	28.156.835
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.528.966.660

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.